



KRITIKAN JOKOWI KE KEPALA DAERAH Kebanyakan Studi Banding



Edy Resmi Mendaftar ke PDIP

Medan, MIMBAR - Eks Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi resmi mendaftar untuk maju sebagai bakal calon Gubernur Sumatera Utara pada Pilgub Sumut 2024. Edy menyerahkan keputusan kepada PDIP apakah nantinya akan mengusungnya di Pilgub Sumut.

■ Bersambung ke Hal 11

Ketua PDIP Sumut Rapidin Simbolon bersama Edy Rahmayadi saat memberikan keterangan kepada wartawan.

Jakarta, MIMBAR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur para kepala daerah terkait penggunaan anggaran berlebihan untuk rapat dan studi banding.

Jokowi meminta kepala daerah memprioritaskan penggunaan anggaran untuk program unggulan. Dia tak ingin anggaran habis diecer untuk program tak jelas. "Jangan sampai anggaran dipakai untuk

rapat-rapat kebanyakan dan studi banding yang kebanyakan. Sudahlah, itu masa lalu. Ini masa depan jangan sampai itu terjadi lagi," kata Jokowi dalam Musrenbangnas di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (6/5).

■ Bersambung ke Hal 11



Laporan Dugaan Korupsi Dana Desa di Langkat

Pelapor Dibola-bola

Langkat, MIMBAR - Warga Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, mendesak aparat penegak hukum, segera mengungkap dan menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi penggunaan dana desa periode 2018-2023. Diketahui, warga sebelumnya sudah melaporkan

dugaan tersebut ke Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Langkat di Pangkalan Brandan pada 26 Maret 2023 silam.

Adapun warga yang membuat laporan dalam perkara ini ialah bernama Jaka didampingi beberapa warga lainnya.

"Kami warga Desa Halaban menyatakan sangat kecewa atas tindaklanjut laporan kami di Cabjari Langkat di Pangkalan Brandan," ujar Jaka, dilansir dari Tribun Medan, Senin (6/5).

■ Bersambung ke Hal 11



Sidang Sengketa Pileg KPU Bantah Gelembungkan Suara PAN hingga Golkar

Jakarta, MIMBAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membantah tuduhan Partai Garuda terkait penggelembungan suara Pileg 2024 untuk beberapa partai di daerah pemilihan Intan Jaya I. Salah satunya untuk Partai Amanat Nasional (PAN).

Hal itu disampaikan oleh Kuasa Hukum KPU Irfan Yudha Oktara dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) legislatif di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (6/5).

■ Bersambung ke Hal 11

Jadwal Salat
28 SYAWAL 1445 H
Subuh : 04:56 WIB Maghrib : 18:32 WIB
Zuhur : 12:25 WIB Isya : 19:44 WIB
Ashar : 15:44 WIB
■ Untuk kota Medan sekitarnya

Hidayah Keringat Guru Honor

Oleh Dr A Rasyid, MA

KONON kabarnya sudah empat bulan ini uang intensif para guru honor di lingkungan Pemerintahan Kota Medan belum dibayar. Perwakilan guru honor itu sudah menghadap DPRD dan Dinas Pendidikan Kota Medan, namun hasilnya masih nihil. Kasihan dan pilu hati kita mendengar jeritan para guru honor itu. Betapa tidak, mungkin dengan insentif yang tak seberapa itu sekitar Rp 800 ribu/bulan sangat menopang kehidupan keluarga mereka. Boleh jadi sebelum insentif itu cair mereka telah menghutang

■ Bersambung ke Hal 11

Analisa Dibalik Pembentukan Presidential Club Siasat Prabowo Rangkul Lawan

PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto berencana membentuk Presidential Club yang diisi oleh para mantan presiden RI yang masih hidup, yakni Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo.

Juru Bicara Prabowo Dahnil Azhar Simanjuntak menjelaskan, Presidential Club bakal dibentuk agar para mantan presiden bisa tetap rutin bertemu dan berdiskusi tentang masalah-masalah strategis kebangsaan. Dahnil mengatakan Prabowo berharap para pemimpin di Indonesia selalu kompak, rukun, guyub memikirkan dan bekerja untuk kepentingan rakyat terlepas dari perbedaan pandangan dan sikap politik yang ada. Rencana Prabowo itu pun menimbulkan pro dan



kontra.

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga menilai rencana Prabowo itu dibentuk karena dua kemungkinan.

Pertama, Prabowo ingin menciptakan stabilitas politik dengan merangkul seluruh kalangan melalui tokoh-tokoh bangsa. Prabowo, kata dia, menginginkan agar roda pemerintahannya di masa depan

tidak diwarnai huru-hara politik alias mencari posisi dan jalan yang aman.

Apalagi para Presiden terdahulu memiliki pendukung dan partai. Dengan demikian, Prabowo kemungkinan berharap segala bentuk kebijakannya tidak akan diwarnai banyak penolakan.

"Seperti pengaruh politik dari

■ Bersambung ke Hal 11

7,2 Juta Rakyat Indonesia Masih Menganggur

Medan, MIMBAR - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat masih ada 7,2 juta pengangguran di Indonesia hingga Februari 2024. Meski masih tinggi, namun jumlahnya turun 790 ribu orang dari periode Februari 2023.

PLT Kepala BPS Amalia Widayanti mengatakan, angka pengangguran masih tinggi karena jumlah angkatan kerja yang muncul tak semuanya terserap atau mendapatkan pekerjaan.

Secara rinci, jumlah penduduk usia kerja di Indonesia mencapai 214 juta orang. Dari jumlah itu yang tercatat sebagai angkatan kerja sebanyak 149,38 juta orang, tetapi yang terserap atau

■ Bersambung ke Hal 11



■ Foya-foya ...
■ Hehehe..

7,2 Juta...

Dari Halaman 1

bekerja hanya 142,18 juta orang.

“Dari angkatan kerja tersebut tidak semuanya terserap di pasar kerja sehingga terdapat pengangguran sebanyak 7,2 juta orang,” ujar Amalia dalam Konferensi Pers, Senin (6/5).

Secara rinci, jumlah pengangguran pada Februari 2024 ini terendah sejak Februari 2020, yang sudah berhasil turun ke 6,93 juta atau 4,94 persen.

Sejak saat itu, jumlah pengangguran terus turun.

Pada Februari 2023 jumlah pengangguran sebanyak 7,99 juta orang. Lalu pada Agustus 2023 turun lagi menjadi 7,86 juta.

Sedangkan, jumlah penduduk bekerja sebanyak 142,18 juta itu terdiri dari pekerja penuh 93,27 juta orang, paruh Waktu 36,8 juta orang dan setengah pengangguran sebanyak 2,11 juta orang.

Apabila dilihat dari jenis kelaminnya, pekerja laki-laki masih mendominasi sebesar 84,02 persen dan pekerja perempuan 55,41 persen. (cnni/js)

Kebanyakan Studi...

Dari Halaman 1

Jokowi mengingatkan, dunia sedang menghadapi situasi perekonomian yang berat. Sejumlah negara telah mengalami resesi.

Dia menjelaskan, kondisi Indonesia mungkin tak seburuk negara lain. Namun, ia tak mau anggaran yang ada justru dihambur-hamburkan.

“Jangan sampai ada uang serupiah pun meleset dari rencana yang kita buat. Perhatikan betul-betul skala prioritas,” ucap Jokowi.

Dia juga mengingatkan para kepala daerah untuk menggunakan anggaran sesuai program pemerintah pusat. Jokowi berkata program pemerintah daerah harus sejalan dengan pembangunan pusat.

“Membangun pelabuhan, perbaikan dibangun ke Kemenhub, tetapi jalan mestinya ini daerah. Jalan ke pelabuhannya, meski pendek cuma sekilo-lima kilometer, tidak dijalankan. Ini yang namanya tidak sinkron, tidak seirama,” ujar Jokowi. (cnni/js)

KPU Bantah...

Dari Halaman 1

“Terkait dengan perolehan suara, dalil pemohon yang pada pokoknya telah mengubah atau mengelembungkan suara PAN untuk di seluruh dapil Intan Jaya 1, kami tolak. Dalil tersebut tidak benar,” kata Irfan.

Dalam dalil permohonannya, Partai Garuda menuduh KPU telah mengelembungkan suara sebanyak 2.614 di dapil Intan Jaya I. Berdasarkan penghitungan KPU, PAN memperoleh 12.756 suara, padahal menurut Partai Garuda seharusnya 10.142.

Irfan menegaskan, KPU tidak melakukan penambahan suara, baik di tingkat rekapitulasi kecamatan hingga kabupaten untuk PAN.

Selain untuk PAN, KPU juga membantah telah mengelembungkan suara

untuk Partai Gerindra di dapil Intan Jaya I. KPU tetap pada hasil rekapitulasi sebelumnya yang mencatat perolehan suara Gerindra adalah 2.361, bukan 1.010 sebagaimana dituduhkan Partai Garuda.

“Terkait dengan dalil pemohon yang pada pokoknya KPU Intan Jaya telah melakukan pengelembungan suara terhadap Gerindra di desa Ndurusiga di TPS 5,” ujarnya.

Selanjutnya, KPU juga membantah telah mengelembungkan suara untuk Partai Golkar di Desa Sambili, dapil Intan Jaya I.

Berdasarkan penghitungan suara KPU, Partai Golkar memperoleh 1.009 suara. Perolehan suara itu membantah anggapan Partai Garuda yang menyebut Partai Golkar seharusnya mendapat 716 suara. (cnni/js)



Hidayah

Keringat Guru...

Dari Halaman 1

ke sana ke mari agar kebutuhan hidup mereka dapat terpenuhi.

Perhatian dan penghargaan pemerintah kepada guru tidak hanya diberikan dalam bentuk tunjangan. Bagi mereka yang tidak menerima tunjangan, guru diberikan penghargaan dalam bentuk insentif.

Insentif diberikan sesungguhnya untuk kesejahteraan dan penghargaan, serta untuk meningkatkan kinerja guru sesuai tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Bagi guru bukan PNS, insentif diberikan kepada guru tetap yang mengajar di sekolah negeri maupun swasta.

Seharusnya insentif seperti itu dapat dilunasi dengan waktu yang tidak memakan terlalu lama. Sebab boleh jadi uang insentif itu sangat dibutuhkan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Boleh adi bagi guru hnor yang punya penghasilan lain di luar sebagai guru, mungkin tidak menjadi persoalan bila insentif tersebut dibayar terlalu lama. Hitung-hitung sebagai uang simpanan.

Kita juga tidak mengetahui penyebab keterlambatan itu, tetapi bleh jadi persoalan keuangan negara saat ini dalam kondisi yang tidak baik-baik sekali. Karena itu para guru honor dapat juga memakluminya.

Tetapi hadis Nabi sangat menekankan agar membayar upah pekerja itu sebelum keringatya kering. bagi setiap majikan hendaklah ia tidak mengakhirkan gaji bawahannya dari waktu yang telah dijanjikan, saat pekerjaan itu sempurna atau di akhir pekerjaan sesuai kesepakatan. Jika disepakati, gaji diberikan setiap bulannya, maka wajib diberikan di akhir bulan. Jika diakhirkan tanpa ada udzur, maka termasuk bertindak zholim.

Allah Ta'ala berfirman mengenai anak yang disusukan oleh istri yang telah diceraikan, “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (QS. Ath Tholaaq: 6). Dalam ayat ini dikatakan bahwa pemberian upah itu segera setelah selesainya pekerjaan.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam juga memerintahkan memberikan upah sebelum keringat si pekerja kering. Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, shahih).

Maksud hadits ini adalah bersegera menaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan. (*)

200 Pengacara Desak ICC Tangkap Netanyahu Cs

Medan, MIMBAR - Sekelompok pengacara disebut mengajukan petisi ke Mahkamah Kriminal Internasional (International Criminal Court/ICC) untuk mendesak rilis surat penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan sejumlah pejabat tinggi.

Mereka mengajukan tuntutan terhadap 12 pejabat tinggi Israel yang diduga terlibat dalam perilaku genosida dan krisis kemanusiaan yang terjadi di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 lalu.

Kelompok yang berjumlah sekitar 200 pengacara menyebut diri mereka sebagai ‘Pengacara Perdamaian’ mengajukan tuntutan hingga petisi ke ICC yang bermarkas di Den Haag, Belanda.

“Permohonan kami terdiri dari 163 halaman dan merupakan salah satu yang paling komprehensif di antara tuntutan pidana yang diajukan

sejauh ini. Kami telah mengajukan permohonan ke Kantor Kejaksaan ICC terhadap total 12 pejabat Israel,” ujar salah satu dari kelompok Pengacara Perdamaian, Ibrahim Yildirim seperti dikutip dari Anadolu Agency, Ahad (5/5).

Ia lanjut menjelaskan terdapat sembilan tim ahli hukum yang telah disiapkan guna mendorong surat penangkapan terhadap Netanyahu.

“Kami mengirimkannya tuntutan pidana ke Kantor Kejaksaan ICC kemarin atas nama kelompok kami. Kami juga telah meluncurkan kampanye di mana mereka yang ingin mendukung petisi ini dapat menambahkan tanda tangan mereka. Jumlah penandatanganan sudah melebihi 500 orang,” ungkap Yildirim.

Ia menggarisbawahi jika tuntutan ini dapat membantu untuk meyakinkan Kejaksaan ICC dengan berbagai bukti kuat.

“Ini upaya yang sudah kami persiapkan sejak lama. Pengaduan kami mempunyai dasar hukum yang kuat dan didukung oleh banyak bukti,” tambahnya.

Rencana mengenai penangkapan Netanyahu Cs telah menjadi sorotan dunia. Sebab, agresi brutal Israel yang telah menewaskan lebih dari 374.000 warga Palestina disebut sebagai tindakan genosida.

Terlebih, berbagai perjanjian dan desakan yang telah disepakati komunitas internasional tak membuat Negeri Zionis itu jera.

Namun, belum ada kabar pasti mengenai kapan terbitnya surat penangkapan terhadap Netanyahu dan beberapa pejabat tingginya.

Kendati demikian, tuntutan dari sekelompok pengacara tersebut diharapkan dapat meyakinkan hingga memperkuat bukti dari ICC untuk segera menangkap Netanyahu Cs. (cnni/js)

Edy Resmi...

Dari Halaman 1

but mengaku memiliki kesamaan visi dan misi dengan PDIP.

“Lima tahun saya jadi gubernur, PDIP yang sebenarnya dulu tidak mendukung saya begitu melihat visi dia pelajari dan dikawal penuh. Karena itulah saya datang ke PDIP. Saya melihat dan saya datang, ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPD PDIP Sumut, Rapidin Simbolon mengatakan pihaknya telah menerima berkas pendaftaran dari Edy Rahmayadi. Rapidin mengaku mengapresiasi kedatangan Edy Rahmayadi beserta timnya ke Kantor DPD PDIP Sumut.

“Ini merupakan suatu kehormatan kepada

Pelapor Dibola-bola...

Dari Halaman 1

Sementara itu, Kasubi Intelijen Cabjari Langkat di Pangkalan Brandan, Juergen Panjaitan saat dikonfirmasi mengatakan, jika Kepala Desa Halaban, Tamaruddin sebelumnya sudah sempat dilakukan pemeriksaan terkait dugaan korupsi dana desa.

“Terkait dengan itu, jadi kemarin sewaktu kita periksa kadensnya, dan berdasarkan dari keterangannya, kades juga diperiksa sama Polres Langkat,” ujar Senin (6/5).

Lanjut Juergen, bahkan item yang dilaporkan ke Polres Langkat sama. Yaitu tentang dugaan korupsi dana Desa Halaban tahun 2018-2023.

“Saat saya tanya Kemitipikornya, ada juga LSM yang melaporkan kesana pada bulan Maret 2024,” ujar Juergen.

Atas hal ini Juergen menambahkan, berdasarkan MoU empat instansi, penanganan perkara dugaan korupsi ini, sekarang ditangani oleh Unit Tipikor Polres Langkat.

“Siapa yang deluan menangani, ya dia yang memproses. Gak mungkin dua penegak hukum memeriksa satu orang,” ujar Juergen.

Dikabarkan sebelumnya, penggunaan Dana Desa (DD) sejak tahun 2018-2023 di Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, diduga kerap dimak up bahkan proyek atau pembangunan tidak dilaksanakan alias fiktif.

Misalnya, pengerasan badan jalan desa di Dusun V Kebun Buah, Desa Halaban TA 2020, yang dikerjakan dalam tiga tahap. Pertahapnya menelan biaya Rp 170 juta.

Menurut informasi yang diperoleh wartawan dari warga yang bertempat di dusun tersebut,

kami sebagai partai nasionalis. Pak Edy percayakan dan memohon untuk diusung oleh partai ini. Ini adalah tahapan awal. Kemarin setelah pengambilan formulir dan saat ini pengembalian,” ujarnya.

Nantinya, tambah Rapidin, berkas tersebut akan diajukan ke DPP PDIP. Sehingga DPP PDIP lah memutuskan siapa yang akan diusung pada Pilgub Sumut 2024.

“Nanti akan kami ajukan ke DPP. Setelah itu DPP akan memanggil calon calon ini untuk uji kelayakan. Kemudian DPP akan mengadakan pleno yang langsung dipimpin Ibu Megawati. Calon calon ini diuji diteliti,” bebarnya. (cnni/js)

pengerasan badan jalan hanya dilakukan sekali saja alias satu tahap.

“Dari total Rp 510 juta itu, setau kami cuma sekali ada pengerasan jalan. Selebihnya gak ada pengerasan jalan di dusun kami,” ujar warga.

Parahnya lagi, tahun anggaran 2022-2023 Desa Halaban kembali menganggarkan pengerasan Jalan Usaha Tani yang berada di Dusun V Kebun Buah, sebesar Rp 427 juta.

Ternyata pengerasan Jalan Usaha Tani tersebut diduga fiktif, alias tidak dikerjakan.

Selain itu, pada tahun 2021, Pemerintah Desa Halaban juga menganggarkan untuk pembangunan jembatan di Dusun I-II.

“Setelah kami cek, laporan realisasinya sebesar Rp134 juta. Sementara, tak pernah ada jembatan di dusun kami itu. Ini kan fiktif namanya,” ujar warga.

Dengan demikian, warga mengatakan dugaan proyek fiktif maupun yang dimark up dari dana desa sejak tahun 2019-2023, mencapai Rp 1 miliar lebih.

Tak hanya itu, beberapa warga yang mengetahui hal tersebut pun berang. Mereka meminta agar persoalan tersebut segera diurus tuntas oleh aparat penegak hukum.

“Gimana desa kami mau maju, ternyata selama ini kayak gimani permainan oknum apartur desa kami,” ujar warga.

“Kami minta kepada aparat penegak hukum agar segera menindaklanjuti persoalan ini. Usut tuntas dugaan korupsi penggunaan DD di Desa Halaban ini. Siapa pun yang terlibat, harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” sambungannya. (tr/js)

Siasat Prabowo...

Dari Halaman 1

Yang paling kentara menurutnya adalah pengaruh demokrasi Indonesia. Sebab proses check and balances menurut Jamil bakal tergerus.

Apabila seluruh pihak bersatu dalam sebuah wadah tanpa ada pihak yang mengkritik, maka dikhawatirkan kebijakan pemerintah selanjutnya akan lebih sedikit memihak kepada rakyat.

“Sehingga saya khawatir demokrasi di Indonesia ini malah tergelincir. Padahal rakyat berharap oposisi itu harus ada dan seharusnya semakin kuat dari pemerintahan pak Jokowi sebelumnya,” ujar Jamil.

Jamil pun menyototi bagaimana DPR sebagai lembaga legislatif di pemerintahan Jokowi justru menjadi lembaga stempel yang meloloskan sejumlah Undang-undang yang kontroversial dan dianggap bermasalah oleh sejumlah rakyat.

“Dan Justru Pak Prabowo dengan rencana Presidential Club seakan ingin mengikuti jejak pemerintahan Pak Jokowi kembali,” imbuh Jamil.

Senada, Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul menilai Presidential Club akan menimbulkan sistem check and balances di Indonesia semakin terdegradasi.

“Mudharatnya, demokrasi ini akan ada dalam alam kuning, bahwa check and balances menjadi lemah. Juga saya kira memang tidak ada urgensinya, tidak usah bikin Presidential Club, cukup telepon, ngopi, minta pendapat, selesai,” kata Adib, Senin (6/5).

Kendati harus diakui merangkul seluruh pihak adalah hal yang baik. Adib pun mengapresiasi apabila tujuannya untuk menciptakan kerukunan Indonesia di masa depan.

Namun menurutnya sulit bagi oposisi duduk satu meja dengan pemerintah, dan mereka akan tetap melawan atau mengkritik di lain kesempatan. Sebab menurutnya politik di Indonesia mayoritas bersifat transaksional.

PDIP misalnya ketika memilih menjadi oposisi, maka mereka akan sulit menunjukkan taring mereka apabila Megawati berada dalam forum yang sama dengan Prabowo.

“Jadi nanti check and balances akan semakin berkurang,” jelasnya.

Kondisi itu menurutnya akan menimbulkan sentimen negatif dari sejumlah masyarakat Indonesia. Rakyat menurutnya akan semakin sulit percaya kepada pemerintahan apabila tidak ada pihak kuat yang menjadi oposisi dan penyeimbang.

presiden terdahulu dapat disatukan. Setidaknya pengikut presidennya terdahulu tidak rewel karena melihat pimpinan rukun kan, itu akan menguntungkan Prabowo, jelas,” kata Jamil, dilansir dari CNNIndonesia.com, Senin (6/5).

“Sehingga harapannya, kritik yang sifatnya sangat tajam terhadap Pak Prabowo dapat diminimalisir,” imbuhnya.

Kedua, Prabowo benar-benar ingin berbagi dan berburu pengalaman presiden terdahulu dengan tujuan dapat mengoptimalkan tugas dan fungsinya sebagai presiden atau setidaknya Prabowo dapat terhindar dari kekurangan presiden terdahulu.

Ia mengatakan pengalaman presiden terdahulu dapat digunakan Prabowo untuk menyusun kabinet dan prioritas program mereka.

“Dengan begitu, kabinet yang disusun akan relatif ideal dan program kerjanya lebih tepat sasaran,” kata Jamil.

Namun demikian, Jamil beranggapan poin utama pembentukan Presidential Club tak lain adalah siasat Prabowo untuk mengamankan dan menyukseskan pemerintahannya selama periode 2024-2029 mendatang.

Prabowo menurutnya masih memiliki sejumlah kekhawatiran apabila pemerintahannya ke depan akan diwarnai penolakan oleh sejumlah tokoh bangsa yang memiliki posisi kuat, misalnya Presiden ke-5 sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Jamil mengatakan PDIP memang beberapa kali menunjukkan sikap untuk membuka peluang bertemu dengan Prabowo. Namun di sisi lain, sinyal PDIP untuk berada di jalur oposisi juga tak kalah kuat.

Sehingga Prabowo menurutnya akan berupaya merangkul PDIP. Salah satu caranya adalah melalui Megawati dengan pertemuan Presidential Club.

“Namun untuk mewujudkan Presidential Club tentu tidak mudah. Sebab, untuk pak SBY, Bu Mega, dan Pak Jokowi tampaknya sulit disatukan dalam wadah tersebut,” jelasnya.

Di sisi lain, mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu juga beranggapan kendati pembentukan klub ini juga beranggapan memiliki niat baik untuk merangkul semua kalangan, namun pembentukan forum itu juga tetap akan menimbulkan sejumlah mudarat.